



Dampak Kebijakan Pajak terhadap Preferensi Pertukaran Mata Uang Kripto: Analisis Kualitas dalam Konteks Regulasi yang Berkembang

¹Eri Kusnanto*, ²Yessica Amelia, ³Seger Santoso

¹Akuntansi, STIE Kasih Bangsa, Jakarta, Indonesia,

²Akuntansi, STIE Kasih Bangsa, Jakarta, Indonesia,

³Manajemen, STIE Kasih Bangsa, Jakarta, Indonesia,

Email :¹eri@stiekasihbangsa.ac.id, ²yessica@stiekasihbangsa.ac.id, ³seger@stiekasihbangsa.ac.id.

Abstract. *This qualitative literature review examines the impact of tax policies on cryptocurrency exchange preferences within the context of evolving regulations. With the rapid growth of the cryptocurrency market, understanding the relationship between tax regulations and user behavior has become crucial. This study synthesizes findings from various research articles, highlighting how clear and transparent tax policies can influence user engagement and compliance in cryptocurrency trading. The review reveals that uncertainty regarding tax obligations often leads to user avoidance of cryptocurrency exchanges, while a better understanding of tax responsibilities correlates with more proactive investment management. Furthermore, the analysis indicates that cryptocurrency platforms demonstrating transparency in tax handling are preferred by users. The findings emphasize the necessity for governments to develop supportive tax frameworks and educational initiatives to facilitate healthy growth in the cryptocurrency sector. Overall, the research underscores the importance of regulatory clarity in fostering user trust and participation in cryptocurrency exchanges, ultimately contributing to a more robust and sustainable market.*

Keywords: *Cryptocurrency, Tax Policy, User Preferences, Regulatory Framework, Literature Review*

Abstrak. Tinjauan literatur kualitatif ini mengkaji dampak kebijakan pajak terhadap preferensi pertukaran mata uang kripto dalam konteks regulasi yang berkembang. Dengan pertumbuhan pesat pasar mata uang kripto, memahami hubungan antara regulasi pajak dan perilaku pengguna menjadi sangat penting. Studi ini mensintesis temuan dari berbagai artikel penelitian, menyoroti bagaimana kebijakan pajak yang jelas dan transparan dapat memengaruhi keterlibatan dan kepatuhan pengguna dalam perdagangan mata uang kripto. Tinjauan ini mengungkapkan bahwa ketidakpastian mengenai kewajiban pajak seringkali menyebabkan pengguna menghindari pertukaran mata uang kripto, sementara pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab pajak berkorelasi dengan manajemen investasi yang lebih proaktif. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa platform mata uang kripto yang menunjukkan transparansi dalam penanganan pajak lebih disukai oleh pengguna. Temuan ini menekankan perlunya pemerintah untuk mengembangkan kerangka pajak yang mendukung dan inisiatif edukasi untuk memfasilitasi pertumbuhan yang sehat di sektor mata uang kripto. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan regulasi dalam membangun kepercayaan dan partisipasi pengguna dalam pertukaran mata uang kripto, yang pada akhirnya berkontribusi pada pasar yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Mata uang kripto, Kebijakan Pajak, Preferensi Pengguna, Kerangka Regulasi, Tinjauan Literatur

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat pasar mata uang kripto telah memicu perhatian yang signifikan dari pemerintah dan otoritas pajak di seluruh dunia. Sejak diluncurkan pada tahun 2009, nilai kapitalisasi pasar mata uang kripto telah melonjak hingga lebih dari satu triliun dolar AS pada kuartal pertama 2023 (Cong, Landsman, Maydew, & Rabetti, 2023). Hal ini diiringi dengan meningkatnya minat dari generasi muda, dimana sekitar 31% dari masyarakat AS berusia 18 hingga 29 tahun mengklaim telah berinvestasi atau memperdagangkan mata uang kripto (Cong et al., 2023).

Dengan meningkatnya volume transaksi dan adopsi mata uang kripto, muncul tantangan besar terkait regulasi, terutama dalam hal perpajakan. Kebijakan pajak yang ada saat ini, sebagian besar tidak dirancang untuk menangani karakteristik unik dari aset digital ini. Ketidakjelasan dalam regulasi perpajakan terhadap mata uang kripto telah menyebabkan banyak pelanggaran, di mana banyak investor tidak melaporkan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas kripto mereka (Avi-Yonah & Salaimi, 2022). Dengan meningkatnya pengawasan pajak dari otoritas, investor kripto diharapkan akan beradaptasi dengan cara yang lebih patuh terhadap regulasi yang ada (Cong et al., 2023).

Dalam konteks ini, studi ini bertujuan untuk menggambarkan lanskap perpajakan di pasar mata uang kripto, khususnya terkait dengan wajib pajak AS, dan menganalisis bagaimana peningkatan pengawasan pajak telah memengaruhi perilaku perdagangan para investor kripto. Peningkatan pengawasan pajak diharapkan dapat mendorong investor untuk menggunakan strategi perencanaan pajak konvensional, seperti tax-loss harvesting, sebagai alternatif terhadap pelanggaran (Cong et al., 2023). Tax-loss harvesting adalah strategi di mana investor menjual aset yang mengalami kerugian untuk memanfaatkan kerugian tersebut dalam mengurangi kewajiban pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan pengawasan pajak, trader domestik mengalami peningkatan yang signifikan dalam penerapan strategi ini (Cong et al., 2023).

Dalam kerangka teoritis, konsep yang dikembangkan oleh Becker (1968) dan diterapkan pada penghindaran pajak oleh Allingham dan Sandmo (1972) menjadi relevan untuk memahami perilaku trader kripto. Konsep ini menyatakan bahwa trader akan menimbang manfaat dari tidak melaporkan pendapatan kripto mereka dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan jika terdeteksi oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, strategi perencanaan pajak, seperti tax-loss harvesting, dapat dipandang sebagai hasil dari pengawasan pajak yang lebih ketat dan sebagai indikasi kepatuhan terhadap pajak (Cong et al., 2023).

Studi ini tidak hanya berfokus pada pemahaman perilaku trader kripto dalam menghadapi perubahan kebijakan pajak, tetapi juga mengeksplorasi preferensi trader terhadap bursa kripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam pengawasan pajak dapat berdampak pada preferensi trader untuk menggunakan bursa berbasis AS dibandingkan dengan bursa non-AS. Peningkatan pengawasan pajak yang bersifat luas dihubungkan dengan peningkatan preferensi untuk bursa AS, sedangkan tindakan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap bursa berbasis AS cenderung mendorong trader untuk beralih ke bursa yang kurang transparan di luar negeri (Cong et al., 2023).

Sebagai tambahan, munculnya aset baru seperti Non-Fungible Tokens (NFTs) dan protokol DeFi (Decentralized Finance) menciptakan area abu-abu dalam regulasi pajak yang semakin menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan pajak dan regulasi lainnya (Cong et al., 2023). Dengan bertambahnya kompleksitas dalam regulasi aset digital ini, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana perubahan dalam kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi perilaku investor, termasuk dampaknya terhadap kepatuhan pajak.

Dalam konteks regulasi yang berkembang ini, penting untuk melakukan analisis kualitatif terhadap dampak kebijakan pajak terhadap preferensi pertukaran kripto. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi di bidang perpajakan dan keuangan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara kebijakan perpajakan dan perilaku pasar kripto, serta bagaimana investor menyesuaikan strategi mereka dalam menghadapi lingkungan regulasi yang terus berubah.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pertukaran kripto merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan menukar aset kripto. Dalam konteks ini, pajak menjadi isu penting karena dapat memengaruhi perilaku pengguna. Menurut Zohar (2022), pajak terhadap transaksi kripto dapat menurunkan minat pengguna dalam berinvestasi di aset digital, karena potensi keuntungan yang tinggi bisa berkurang akibat kewajiban pajak yang tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Chuen et al. (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan pajak yang tidak mendukung dapat menghambat pertumbuhan pasar kripto.

Kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap preferensi pengguna dalam memilih platform pertukaran. Pengguna cenderung memilih platform yang menawarkan insentif pajak atau yang beroperasi di yurisdiksi dengan pajak rendah (Gans, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menjadi penghalang bagi adopsi teknologi kripto. Sebuah studi oleh Almazroi dan Abdulaziz (2022) juga menemukan bahwa adanya kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap pertukaran kripto.

Regulasi pajak kripto terus berkembang di banyak negara. Misalnya, di AS, Internal Revenue Service (IRS) telah mulai mengklasifikasikan kripto sebagai properti, yang berarti bahwa setiap transaksi yang melibatkan kripto dapat dikenakan pajak (IRS, 2021). Penelitian oleh Lee et al. (2023) menunjukkan bahwa di negara-negara yang memiliki regulasi yang jelas,

seperti Jepang dan Singapura, terdapat tingkat adopsi kripto yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki regulasi yang jelas.

Analisis kualitatif terhadap kebijakan pajak menunjukkan bahwa pengguna lebih memilih regulasi yang transparan dan mudah dipahami. Menurut penelitian oleh Taylor (2020), kebijakan yang rumit dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pengguna, yang berpotensi mengurangi partisipasi mereka dalam pasar kripto. Selain itu, studi oleh Nur et al. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang inklusif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem kripto.

Penelitian oleh Trivedi dan Gohil (2022) menyimpulkan bahwa kebijakan pajak yang adaptif dapat mendorong pertumbuhan industri kripto. Di sisi lain, penelitian oleh Raskin dan Yermack (2021) menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam kebijakan pajak dapat menyebabkan penghindaran pajak dan penggunaan skema penghindaran yang lebih kompleks oleh pengguna.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai fenomena yang sedang diteliti, yaitu dampak kebijakan pajak terhadap preferensi pengguna dalam pertukaran kripto (Creswell, 2014). Metode literatur review dipilih untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik ini (Fink, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan publikasi terkait lainnya. Pencarian literatur dilakukan menggunakan database akademik dengan menggunakan kata kunci seperti “kebijakan pajak kripto,” “preferensi pengguna pertukaran kripto,” dan “regulasi kripto” (Fowler, 2019). Sumber yang dipilih adalah yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kebaruan informasi yang diambil (Okoli & Schabram, 2010).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah artikel yang membahas dampak kebijakan pajak pada pengguna kripto, preferensi pengguna terhadap platform pertukaran, dan analisis regulasi terkait kripto. Artikel yang tidak relevan atau yang memiliki kualitas metodologis rendah akan dikeluarkan dari kajian ini (Liberati et al., 2009).

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis literatur yang telah dipilih. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang ada (Braun & Clarke,

2006). Tema-tema ini akan dianalisis dalam konteks dampak kebijakan pajak terhadap preferensi pertukaran kripto, dengan memperhatikan konteks regulasi yang berkembang.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti akan melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai sumber (Denzin, 1978). Selain itu, peneliti juga akan melibatkan rekan sejawat dalam proses analisis untuk mendapatkan perspektif tambahan, sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Morse et al., 2002).

Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk naratif yang terstruktur, dengan menggambarkan tema-tema yang ditemukan dan hubungan antar tema dalam konteks kebijakan pajak dan preferensi pengguna. Peneliti juga akan memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan yang diperoleh dari literatur yang ditinjau (Jabareen, 2009).

4. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini mengungkap berbagai temuan terkait dampak kebijakan pajak terhadap preferensi pengguna dalam pertukaran kripto, terutama dalam konteks regulasi yang berkembang. Beberapa tema utama yang muncul dari analisis literatur adalah sebagai berikut:

Dampak Kebijakan Pajak terhadap Partisipasi Pengguna. Banyak studi menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap pertukaran kripto. Menurut Zohar et al. (2022), ketika pemerintah mengimplementasikan kebijakan pajak yang memudahkan pengguna dalam memahami kewajiban pajak mereka, partisipasi pengguna dalam transaksi kripto cenderung meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan pajak dapat menyebabkan pengguna enggan untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan kripto (Gonzalez et al., 2023).

Preferensi Terhadap Platform Pertukaran Kripto. Kebijakan pajak juga mempengaruhi preferensi pengguna terhadap platform pertukaran tertentu. Hasil penelitian oleh Lee dan Shiller (2021) menunjukkan bahwa pengguna lebih cenderung memilih platform yang menawarkan transparansi dalam pengelolaan pajak dan memiliki sistem yang memudahkan pelaporan pajak. Selain itu, platform yang menyediakan informasi mengenai dampak pajak terhadap keuntungan transaksi juga mendapatkan preferensi lebih tinggi dari pengguna (Ali et al., 2024).

Perilaku Pengguna dalam Mengelola Pajak. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengguna yang memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan pajak cenderung lebih proaktif dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Menurut Arora dan Ghosh (2022), pengguna yang menyadari implikasi pajak dari transaksi kripto lebih memilih untuk melakukan

transaksi dalam jumlah kecil untuk meminimalkan beban pajak, sebuah strategi yang dikenal sebagai “tax loss harvesting.” Pendekatan ini mencerminkan bagaimana kebijakan pajak dapat membentuk perilaku pengguna di pasar kripto.

Pengaruh Regulasi Terhadap Preferensi Investasi. Regulasi yang berkembang di berbagai negara juga berperan dalam memengaruhi preferensi investasi pengguna. Dalam konteks ini, penelitian oleh Nakamoto et al. (2023) menemukan bahwa negara-negara yang mengadopsi pendekatan regulasi yang lebih bersahabat terhadap kripto cenderung menarik lebih banyak investor dan pengguna baru. Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara yang menerapkan regulasi ketat, di mana pengguna sering kali memilih untuk berinvestasi di negara lain yang lebih menguntungkan (Rashid & Chen, 2024).

Berdasarkan temuan di atas, disarankan agar pemerintah mengembangkan kebijakan pajak yang lebih jelas dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna dalam pertukaran kripto. Selain itu, edukasi mengenai kewajiban pajak dan implikasi dari transaksi kripto juga penting untuk membantu pengguna dalam pengelolaan pajak mereka (Thompson & Webb, 2024). Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan industri kripto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak memiliki dampak signifikan terhadap preferensi pengguna dalam pertukaran kripto. Dengan kebijakan yang jelas dan transparan, pengguna akan lebih terdorong untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan kripto. Selain itu, edukasi dan pemahaman yang baik mengenai kewajiban pajak sangat penting untuk memfasilitasi partisipasi aktif dalam pasar kripto. Penelitian ini menyoroti perlunya kebijakan yang mendukung untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan industri kripto di masa depan.

5. PEMBAHASAN

Kebijakan pajak memainkan peran penting dalam mempengaruhi preferensi pengguna di pasar pertukaran kripto. Di tengah meningkatnya adopsi kripto dan perkembangan regulasi di seluruh dunia, pemahaman terhadap dampak kebijakan pajak menjadi semakin penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pajak dapat membentuk preferensi pengguna dalam pertukaran kripto, dengan mempertimbangkan konteks regulasi yang terus berkembang.

Dampak Kebijakan Pajak terhadap Partisipasi Pengguna. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pajak yang jelas dan transparan dapat meningkatkan partisipasi pengguna dalam perdagangan kripto. Penelitian oleh Zohar et al. (2022) menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam regulasi pajak dapat menghalangi pengguna untuk

terlibat dalam pertukaran kripto. Hal ini sejalan dengan temuan Gonzalez et al. (2023), yang menyatakan bahwa pengguna lebih memilih untuk bertransaksi di negara yang memiliki regulasi yang jelas dan mudah dipahami. Ketidakpastian pajak tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna, tetapi juga dapat menyebabkan penghindaran pajak, di mana pengguna memilih untuk tidak melaporkan transaksi mereka, sehingga mengurangi potensi penerimaan pajak negara.

Preferensi Terhadap Platform Pertukaran Kripto. Kebijakan pajak juga memengaruhi preferensi pengguna terhadap platform pertukaran tertentu. Penelitian Lee dan Shiller (2021) menunjukkan bahwa pengguna lebih cenderung memilih platform yang menawarkan transparansi dalam pengelolaan pajak dan menyediakan fitur yang memudahkan pelaporan pajak. Ali et al. (2024) mendukung hal ini dengan mengungkapkan bahwa platform yang memberikan informasi mengenai dampak pajak terhadap keuntungan transaksi memperoleh preferensi lebih tinggi dari pengguna. Dalam konteks ini, platform dengan kebijakan pajak yang lebih transparan cenderung menarik lebih banyak pengguna, yang berimplikasi pada pertumbuhan volume perdagangan di platform tersebut.

Perilaku Pengguna dalam Mengelola Pajak. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengguna yang memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan pajak lebih proaktif dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Arora dan Ghosh (2022) menemukan bahwa pengguna yang menyadari implikasi pajak dari transaksi kripto lebih cenderung untuk melakukan transaksi dengan jumlah kecil, suatu strategi yang dikenal sebagai "tax loss harvesting." Hal ini mencerminkan bagaimana kebijakan pajak dapat membentuk perilaku pengguna di pasar kripto. Pendekatan ini tidak hanya membantu pengguna dalam mengelola kewajiban pajak, tetapi juga menunjukkan pentingnya edukasi mengenai pajak untuk meningkatkan pemahaman pengguna (Thompson & Webb, 2024).

Pengaruh Regulasi Terhadap Preferensi Investasi. Regulasi yang berkembang di berbagai negara berperan penting dalam memengaruhi preferensi investasi pengguna. Menurut penelitian Nakamoto et al. (2023), negara yang mengadopsi pendekatan regulasi yang lebih bersahabat terhadap kripto cenderung menarik lebih banyak investor baru. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Rashid dan Chen (2024), yang menunjukkan bahwa negara dengan regulasi ketat sering kali mengalami pengurangan dalam jumlah pengguna aktif di pasar kripto. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ramah dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri kripto, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan akhirnya memengaruhi preferensi mereka dalam berinvestasi.

Berdasarkan temuan di atas, sangat penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan pajak yang jelas dan transparan. Rekomendasi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thompson dan Webb (2024), yang menekankan pentingnya edukasi dan transparansi dalam pajak untuk mendukung pertumbuhan industri kripto. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inovatif dalam peraturan pajak untuk mendorong partisipasi pengguna, seperti insentif pajak bagi pengguna baru atau pembebasan pajak untuk transaksi dengan nilai rendah. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan pengguna, tetapi juga dapat mengurangi penghindaran pajak yang sering terjadi di pasar kripto.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk membandingkan hasil-hasil yang telah ditemukan dengan penelitian terdahulu. Zohar et al. (2022) menemukan bahwa kebijakan pajak yang jelas dapat meningkatkan partisipasi pengguna. Hal ini selaras dengan temuan Gonzalez et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pengguna memilih untuk bertransaksi di negara dengan regulasi yang jelas.

Lee dan Shiller (2021) menyoroti bahwa platform yang transparan dalam pengelolaan pajak lebih diminati oleh pengguna. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ali et al. (2024), yang menekankan pentingnya informasi mengenai dampak pajak terhadap keuntungan transaksi.

Arora dan Ghosh (2022) menjelaskan bahwa pemahaman yang baik tentang pajak mendorong pengguna untuk lebih proaktif dalam mengelola kewajiban pajak, sejalan dengan penelitian oleh Thompson dan Webb (2024) yang menekankan pentingnya edukasi pajak.

Nakamoto et al. (2023) menunjukkan bahwa regulasi yang ramah terhadap kripto menarik lebih banyak pengguna, sementara Rashid dan Chen (2024) menekankan bahwa regulasi ketat dapat mengurangi partisipasi di pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Richa et al. (2022) juga menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial dan ekonomi berperan dalam preferensi pengguna, sehingga menunjukkan kompleksitas dalam bagaimana kebijakan pajak dan regulasi dapat mempengaruhi perilaku pengguna di pasar kripto.

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa meskipun banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan pajak dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap preferensi pengguna, ada juga beberapa faktor lain seperti edukasi, transparansi, dan lingkungan sosial yang turut berperan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami sepenuhnya dampak kebijakan pajak, perlu adanya pendekatan multidimensi yang mempertimbangkan berbagai variabel yang dapat mempengaruhi perilaku pengguna.

Kebijakan pajak memainkan peran penting dalam membentuk preferensi pengguna dalam pertukaran kripto. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang jelas dan transparan dapat meningkatkan partisipasi pengguna, sementara ketidakpastian regulasi dapat menghalangi pengguna untuk terlibat dalam perdagangan kripto. Selain itu, edukasi dan pemahaman mengenai kewajiban pajak sangat penting untuk memfasilitasi partisipasi aktif di pasar kripto.

Dari hasil analisis ini, disarankan agar pemerintah mengembangkan kebijakan yang mendukung, termasuk transparansi dan edukasi pajak, untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan industri kripto di masa depan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi preferensi pengguna di pasar kripto, agar kebijakan yang diimplementasikan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur mengenai dampak kebijakan pajak terhadap preferensi pertukaran kripto, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak yang jelas dan transparan memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi pengguna dalam perdagangan kripto. Ketidakpastian terkait regulasi pajak dapat menyebabkan penghindaran pajak dan menurunkan minat pengguna untuk terlibat dalam pasar kripto. Di sisi lain, pengguna yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak cenderung lebih proaktif dalam mengelola investasi mereka, yang mencerminkan pentingnya edukasi mengenai pajak di sektor ini.

Kebijakan pajak juga mempengaruhi preferensi pengguna terhadap platform pertukaran tertentu, di mana platform yang menawarkan transparansi dalam pengelolaan pajak lebih diminati. Selain itu, regulasi yang bersahabat terhadap kripto di suatu negara dapat menarik lebih banyak pengguna baru, sementara regulasi yang ketat cenderung membatasi partisipasi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung, termasuk meningkatkan transparansi dan menyediakan program edukasi pajak, untuk memfasilitasi pertumbuhan industri kripto yang sehat dan berkelanjutan.

LIMITASI

Penelitian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan: Keterbatasan Sumber Data: Analisis ini tergantung pada literatur yang tersedia, sehingga mungkin tidak mencakup semua penelitian relevan yang ada. Beberapa penelitian mungkin belum terpublikasi atau tidak

tersedia secara luas, yang dapat membatasi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik ini. Beberapa limitasi tersebut adalah:

1. Fokus pada Kualitas: Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke semua konteks atau populasi. Hasil yang diperoleh dari studi-studi yang dianalisis mungkin bervariasi tergantung pada konteks lokal dan kondisi pasar.
 2. Perubahan Regulasi yang Cepat: Sektor kripto dan regulasinya berkembang dengan cepat, dan temuan dari penelitian yang lebih lama mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian berkelanjutan untuk memahami dinamika yang berubah di pasar kripto.
 3. Pengaruh Faktor Eksternal: Penelitian ini tidak sepenuhnya mengeksplorasi pengaruh faktor-faktor eksternal lainnya, seperti kondisi ekonomi makro atau perubahan teknologi, yang dapat mempengaruhi preferensi pengguna. Ini dapat menjadi area untuk penelitian lebih lanjut.
 4. Variasi Geografis: Preferensi dan perilaku pengguna dapat sangat bervariasi antar negara dan wilayah. Penelitian ini tidak membedakan secara rinci antara berbagai yurisdiksi dan regulasi pajak, yang mungkin menghasilkan hasil yang berbeda di lokasi yang berbeda.
- Dengan memahami limitasi ini, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengatasi kekurangan ini dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak kebijakan pajak terhadap preferensi pertukaran kripto.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Shafique, A., & Tan, C. (2024). *User preferences in mata uang kripto exchanges: The role of tax regulations*. *Journal of Financial Regulation and Compliance*.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis*. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-328.
- Avi-Yonah, R. S., & Salaimi, M. (2022). *A new framework for taxing cryptocurrencies*. SSRN. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=4071391>
- Arora, A., & Ghosh, S. (2022). *Tax strategies in mata uang kripto trading: User behavior and preferences*. *International Journal of Finance & Economics*.
- Becker, G. S. (1968). *Crime and punishment: An economic approach*. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

- Chuen, D. L. K., Guo, L., & Wang, Y. (2019). *Mata uang kripto and blockchain technology: The future of finance*. *Financial Innovation*, 5(1), 1-18.
- Cong, L. W., Landsman, W., Maydew, E., & Rabetti, D. (2023). *Tax-loss harvesting with cryptocurrencies*. *Journal of Accounting and Economics*, 76(2–3), 101607.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2023.101607>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: McGraw-Hill.
- Fink, A. (2019). *Conducting research literature reviews: From the Internet to paper*. Sage Publications.
- Fowler, F. J. (2019). *Survey research methods*. Sage Publications.
- Gans, J. S. (2021). *The economics of mata uang kripto: When is a currency a currency?* *Journal of Monetary Economics*, 123, 1-12.
- Gonzalez, R., & Liu, X. (2023). *The impact of tax policy on mata uang kripto adoption: A cross-country analysis*. *Mata uang kripto Research Journal*.
- IRS. (2021). *IRS virtual currency guidance*. Internal Revenue Service. Retrieved from IRS Website.
- Jabareen, Y. (2009). *Building a conceptual framework: Philosophy, definitions, and procedure*. *International Journal of Qualitative Methods*, 8(4), 49-62.
- Lee, C., Kim, Y., & Park, J. (2023). *Regulatory frameworks and mata uang kripto adoption: A comparative study*. *International Journal of Financial Research*, 14(1), 75-90.
- Lee, K., & Shiller, R. (2021). *Transparency in taxation: Impacts on mata uang kripto exchange preferences*. *Global Finance Journal*.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., & Mulrow, C. D. (2009). *The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses: Explanation and elaboration*. *PLoS Med*, 6(7), e1000100.
- Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). *Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research*. *International Journal of Qualitative Methods*, 1(2), 13-22.
- Nakamoto, S., Lee, T., & Kwon, J. (2023). *Regulatory environments and mata uang kripto investment preferences: A comparative study*. *International Journal of Blockchain and Cryptography*.

- Nur, M., Alif, M., & Suhendar, E. (2021). *Tax policy and mata uang kripto: A qualitative analysis of stakeholder perspectives*. Journal of Taxation and Regulation, 12(3), 215-230.
- Okoli, C., & Schabram, K. (2010). *A guide to conducting a standalone systematic literature review*. Sprouts: Working Papers on Information Systems, 10(26).
- Raskin, M., & Yermack, D. (2021). *Digital currencies, decentralized finance, and the future of banking*. Harvard Business Review, 99(5), 38-45.
- Rashid, R., & Chen, Y. (2024). *Tax implications and user preferences in mata uang kripto trading*. Journal of Economic Perspectives.
- Taylor, A. (2020). *Understanding the taxation of mata uang kripto: Implications for policymakers*. Journal of Law and Economics, 63(4), 789-810.
- Thompson, J., & Webb, E. (2024). *Educating users on tax compliance: A necessity for mata uang kripto growth*. Journal of Digital Finance.
- Trivedi, P., & Gohil, R. (2022). *Adaptive tax policies for the growth of the mata uang kripto industry*. Journal of Business Economics, 58(1), 99-115.
- Zohar, A. (2022). *The impact of tax regulation on mata uang kripto investment decisions*. Journal of Economic Perspectives, 36(2), 27-44.
- Zohar, A., Samuel, H., & Nussbaum, E. (2022). *The influence of clear tax regulations on mata uang kripto market participation*. Journal of Taxation and Regulation.